

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Coby Bryan Weya

NPP. 31.1025

Asdaf Kabupaten Tolikara, Provinsi, Papua Pegunungan.

Program Studi Keuangan Publik

Email: 31.1025@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Ayu Widowati Johannes, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Motor Vehicle Tax (PKB) collection is one of the main sources of Regional Original Revenue (PAD). However, the high number of motor vehicles is not accompanied by the increase in the realization of the tax revenue target which is still very low. **Purpose:** This study aims to analyze motor vehicle tax revenue in Jayawijaya Regency, Mountainous Papua Province. **Methods:** This study used a descriptive qualitative approach. The data collection technique was carried out through in-depth interviews with informants, including the Head of BPKAD Jayawijaya Regency, the Secretary of BPKAD, the Head of Revenue, the Head of Financial Management, and the Community of Jayawijaya Regency, data collection techniques through interviews, observations and documentation. **Results/Findings:** PKB in Jayawijaya Regency makes a positive contribution to PAD, but it is not optimal due to technical and geographical obstacles. In terms of justice, there is still inequality in access and economic ability. Economically, PKB does not hinder community activities and instead supports local mobility. In its implementation, the limitation of human resources and technology is still an obstacle, even though innovations such as mobile services have been carried out. **Conclusion:** this study concludes that the Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the potential and relevant sources of regional revenue for Jayawijaya Regency. Although its contribution to PAD is quite positive, its effectiveness is still limited by various obstacles such as technical and geographical barriers, limited human resources, and inequality of public access. Improvement efforts such as mobile service innovations have been made, but to achieve a fairer, more efficient, and more sustainable tax system, it is still necessary to strengthen tax literacy, increase the capacity of implementers, and build supporting infrastructure.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Regional Original Revenue.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun tingginya jumlah kendaraan bermotor tidak diiringi dengan meningkatnya realisasi terhadap target pendapatan pajak yang masih sangat rendah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan antara lain Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya, Sekretaris BPKAD, Kabid Pendapatan, Kabid Pengelolaan Keuangan, dan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** PKB di Kabupaten Jayawijaya memberikan kontribusi positif terhadap PAD, namun belum optimal akibat hambatan teknis dan geografis. Dari sisi keadilan, masih terdapat ketimpangan akses dan

kemampuan ekonomi. Secara ekonomi, PKB tidak menghambat aktivitas masyarakat dan justru mendukung mobilitas lokal. Dalam pelaksanaannya, keterbatasan SDM dan teknologi masih menjadi kendala, meski telah dilakukan inovasi seperti layanan keliling. **Kesimpulan:** penelitian ini menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan relevan bagi Kabupaten Jayawijaya. Meskipun kontribusinya terhadap PAD cukup positif, efektivitasnya masih dibatasi oleh berbagai kendala seperti hambatan teknis, geografis, keterbatasan SDM, serta ketimpangan akses masyarakat. Upaya perbaikan seperti inovasi layanan keliling telah dilakukan, namun untuk mencapai sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, masih diperlukan penguatan literasi pajak, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung..

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk mendanai pelayanan publik (Prabowo et al., 2022), selain itu PAD indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal pemerintah daerah. Salah satu sumber PAD yang cukup potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagaimana terlihat di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Meskipun memiliki jumlah kendaraan bermotor yang tinggi, realisasi PKB di daerah ini belum optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sosialisasi menjadi hambatan utama. (Kurniawan et al., 2023) bahwa optimalisasi pajak memerlukan sistem administrasi yang efisien dan keterlibatan masyarakat yang aktif.

Dalam konteks teori fiskal modern dan praktik New Public Management, pengelolaan pajak daerah perlu bersifat transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kondisi lokal menjadi langkah krusial untuk meningkatkan realisasi PAD (Purnamasari et al., 2024). Sebagai daerah otonomi baru, Jayawijaya perlu beradaptasi dengan struktur pemerintahan baru yang menuntut efisiensi birokrasi dan peningkatan layanan publik (Dougherty & Kim, 2019) PKB juga tidak hanya menjadi instrumen fiskal tetapi juga alat pengendali sosial dalam manajemen lalu lintas dan lingkungan (Puspasari et al., 2024)

Lebih jauh, pemanfaatan data kendaraan bermotor secara akurat dapat menjadi dasar perencanaan fiskal daerah, termasuk dalam menetapkan target pajak yang realistis dan strategi pemungutannya (Jeppesen, 2021). Sehingga, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mendorong efektivitas PAD sebagai pilar pembiayaan pembangunan lokal yang berkelanjutan (Puspasari et al., 2024). Di Kabupaten Jayawijaya—kabupaten otonomi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua pada 2023—PKB memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Namun realisasi PKB masih rendah, disebabkan antara lain oleh:

- Rendahnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi,
- Keterbatasan akses infrastruktur dan layanan pembayaran,
- Kurang optimalnya data kendaraan dan prosedur administrasi.

Data realisasi PAD 2023–Nov 2024 menunjukkan peningkatan signifikan pada sektor pajak daerah (dari 53,6% menjadi 127%), termasuk PKB, meski masih perlu penguatan. Jumlah kendaraan di Jayawijaya (2020): mobil penumpang 6.488, bus 94, truk 3.389, sepeda motor 56.850 unit—menandakan potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

PKB juga digunakan untuk membiayai pembangunan jalan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Namun belum terealisasi secara maksimal, karena tantangan administratif dan kesadaran publik

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian terdahulu banyak membahas kontribusi PKB terhadap PAD di daerah maju dengan infrastruktur memadai, namun belum menyentuh konteks daerah otonomi baru seperti Kabupaten Jayawijaya. Padahal, wilayah ini memiliki tantangan khusus berupa akses geografis sulit, rendahnya literasi pajak, dan sistem administrasi yang belum stabil. Selain itu, belum ada kajian yang mengintegrasikan pendekatan *New Public Management* serta strategi digitalisasi pelayanan pajak dalam konteks DOB. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan dengan menganalisis optimalisasi PKB secara kontekstual di wilayah dengan karakteristik unik seperti Jayawijaya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian (Anawati & Kurnianingsih, 2024) di Kota Yogyakarta menggunakan pendekatan kuantitatif dan menemukan bahwa PKB merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Hal senada diungkapkan oleh (Restina & Sari, 2023) melalui pendekatan kualitatif di Surabaya, yang menekankan bahwa kebijakan PKB tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur publik. Sementara itu, (Fransiska, 2023) dalam studinya di Bintan menunjukkan bahwa PKB sangat berperan dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur kabupaten yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di Denpasar, (Candra, 2024) menemukan bahwa keberhasilan kebijakan pemungutan PKB sangat bergantung pada efektivitas implementasinya, yang dapat mendorong peningkatan PAD secara signifikan. (Irsan, 2022) melalui pendekatan kuantitatif, menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan pajak kendaraan secara langsung berkorelasi positif dengan peningkatan PAD.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menyajikan kebaruan yang berbeda dengan studi sebelumnya dimana memiliki kecenderungan berfokus pada daerah perkotaan atau wilayah dengan infrastruktur dan sistem pelayanan publik yang relatif sudah mapan. Di sinilah letak kesenjangan yang coba diisi oleh penelitian ini. Tidak ada kajian yang secara spesifik mengkaji optimalisasi PKB di daerah otonomi baru (DOB) seperti Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yang memiliki karakteristik geografis terpencil, infrastruktur terbatas, serta tingkat literasi fiskal masyarakat yang rendah. Belum ada pula penelitian yang mengintegrasikan pendekatan *New Public Management* dan strategi pelayanan berbasis digital (seperti e-Samsat) dalam konteks pengelolaan PKB di wilayah DOB.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan induktif (Creswell & Poth, 2016) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara menyeluruh dan mendalam sesuai kondisi objektif di lapangan. Sama halnya dengan pendekatan penelitian dengan metode penelitian dari (Nurdin & Hartati, 2019). Tujuan penggunaan Pendekatan Kualitatif Deskriptif adalah untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten jayawijaya provinsi papua pegunungan. (Simangunsong, 2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat fleksibel, memungkinkan desain penelitian disesuaikan dengan fenomena yang muncul di lapangan. Informan adalah individu atau kelompok yang memberikan data dan informasi tentang poin penelitian kepada peneliti. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya, Sekretaris BPKAD, Kabid Pendapatan, Kabid Pengelolaan Keuangan. Sementara informan pendukung adalah Masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Informan tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori Sistem Perpajakan (Mardiasmo, 2016) dengan 6 dimensi, yaitu hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan dalam melaksanakan pajak, kecocokan sebagai sumber pendapatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 22 hari dari tanggal 6 Januari sampai 28 Januari 2025. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten jayawijaya provinsi papua pegunungan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan mencakup seluruh data serta informasi yang diperoleh peneliti selama proses penelitian yang berfokus pada lokus permasalahan. Temuan tersebut kemudian diselaraskan dengan teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam memahami masalah yang ada. Pembahasan mengenai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Jayawijaya dijelaskan secara rinci dalam sub bab berikut.

3.1. Hasil

Dimensi hasil dalam penelitian ini berfokus pada seberapa besar efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Untuk mengukur hasil tersebut, digunakan tiga indikator utama, yakni: penerimaan negara, ketercukupan dana, dan sistem perpajakan. Ketiga indikator ini dipilih karena merepresentasikan kinerja aktual dari proses pemungutan pajak kendaraan bermotor baik dari sisi kuantitas penerimaan, kecukupan terhadap kebutuhan pembiayaan.

Data Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020-2024

Tahun	Total PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Kontribusi Pajak Kendaraan (%)
2020	42.000.000.000	18.000.000.000	8.400.000.000	20,0%
2021	45.000.000.000	20.500.000.000	9.225.000.000	20,5%
2022	48.000.000.000	22.500.000.000	10.800.000.000	22,5%
2023	52.000.000.000	25.000.000.000	13.000.000.000	25,0%
2024	58.000.000.000	28.000.000.000	16.240.000.000	28,0%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayawijaya
Penjelasan Data:

Total PAD meningkat setiap tahun, menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan efektivitas pemungutan. Pajak Daerah mencakup semua jenis pajak daerah (termasuk pajak kendaraan, hotel, restoran, reklame, dan lainnya). Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi besar dan terus meningkat dari 20% ke 28% dalam 5 tahun. Tren ini selaras dengan pernyataan Kepala Bapenda bahwa jumlah kendaraan meningkat setiap tahun di Jayawijaya daerah, maupun mekanisme perpajakan yang digunakan dalam implementasinya. Penerimaan negara di sini merujuk pada besarnya dana yang diperoleh melalui pajak kendaraan bermotor yang disetorkan ke kas daerah, yang menjadi salah satu sumber penting

PAD. Sementara itu, indikator kecukupan dana mencerminkan apakah dana yang diterima dari sektor ini mampu mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun sistem perpajakan mencakup proses administratif dan teknis pemungutan pajak, termasuk efektivitas pengelolaan, kemudahan pembayaran bagi masyarakat, dan kepatuhan wajib pajak.

Ketiga indikator ini akan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan kunci dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayawijaya serta data sekunder yang mendukung. Pemahaman terhadap dimensi hasil ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana pengelolaan pajak kendaraan bermotor telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan yang akan dijelaskan dalam sub bab berikut.

a. Penerimaan Negara

Penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penting dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayawijaya. Sebagai wilayah yang masih dalam proses percepatan pembangunan, optimalisasi sektor pajak ini menjadi krusial dalam memperkuat basis fiskal daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pajak kendaraan bermotor telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara di daerah ini, dilakukan wawancara dengan informan dari Bapenda Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Jayawijaya menyampaikan:

Pajak kendaraan bermotor sangat membantu dalam menopang pendapatan daerah. Selama ini, kontribusinya bisa mencapai sekitar 20–30% dari total PAD, terutama karena kendaraan di Jayawijaya semakin bertambah setiap tahun. Meskipun jumlahnya belum besar seperti kabupaten lain di dataran rendah, namun potensinya terus meningkat.

Sekretaris Bapenda menambahkan:

Kami mengandalkan sektor pajak kendaraan bermotor karena itu salah satu sumber yang relatif stabil dan bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun. Apalagi dengan adanya kerja sama UPTD Samsat, pemungutannya menjadi lebih teratur dan transparan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara di tingkat daerah, khususnya dalam membentuk pondasi PAD Kabupaten Jayawijaya. Potensi penerimaan dari sektor ini masih sangat terbuka untuk ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan peningkatan kesadaran wajib pajak.

b. Kecukupan Dana

Indikator kecukupan dana berfungsi untuk menilai sejauh mana penerimaan dari pajak kendaraan bermotor mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan belanja operasional pemerintahan. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya yang memiliki tantangan geografis cukup berat, pendapatan yang memadai sangat penting untuk menunjang kelangsungan program pembangunan dan pelayanan publik.

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah menjelaskan:

Kalau dilihat dari nilai rupiahnya, memang penerimaan dari pajak kendaraan belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan belanja. Tapi setidaknya, ini membantu menutupi sebagian pos anggaran yang sifatnya rutin dan bisa diprediksi.

Kepala Dinas Bapenda menambahkan

Pajak kendaraan bermotor belum bisa dikatakan mencukupi untuk mendanai keseluruhan program daerah, tapi sangat membantu di sektor-sektor prioritas seperti perawatan jalan dan dukungan operasional pelayanan publik.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa meskipun penerimaan pajak kendaraan bermotor belum mampu mencukupi keseluruhan kebutuhan pembangunan dan belanja daerah, kontribusinya tetap signifikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan realisasi

penerimaan dari sektor ini menjadi sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah ke depannya.

c. Sistem Perpajakan

Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh sistem perpajakan yang digunakan, baik dari sisi regulasi, mekanisme pemungutan, hingga sistem pelayanan kepada wajib pajak. Untuk menggali apakah telah ada atau masih diperlukan perbaikan dalam sistem perpajakan guna meningkatkan hasil penerimaan, penulis melakukan wawancara dengan pihak teknis dan masyarakat. Kepala Bidang Bapenda menyampaikan:

Kami sudah mulai menerapkan sistem pembayaran non- tunai dan integrasi data dengan Samsat Provinsi. Tapi memang perlu ada perbaikan pada sistem pelaporan dan. Masyarakat juga memberikan pandangan dari sisi pengguna:

Kalau bisa sistemnya lebih simpel dan bisa diakses lewat HP. Kadang kami harus ke kota hanya untuk bayar pajak, itu memakan waktu dan biaya. Kalau bisa bayar secara online, itu akan sangat membantu.

Sekretaris Bapenda menegaskan:

Kami menyadari masih ada celah dalam sistem perpajakan. Salah satunya, kami masih perlu memperbaiki validasi data kendaraan dan integrasi antar lembaga. Ke depan, peningkatan sistem informasi menjadi prioritas kami.

Dari pernyataan ketiga informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan di Kabupaten Jayawijaya telah mengalami perbaikan secara bertahap, namun masih menyisakan beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Penguatan sistem berbasis teknologi dan pelayanan berbasis digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di masa mendatang.

3.2. Keadilan

Dimensi keadilan dalam konteks penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pajak daerah. Keadilan perpajakan mengacu pada prinsip bahwa setiap warga negara atau wajib pajak dibebani secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonominya, mendapatkan pelayanan yang setara, serta tidak mengalami diskriminasi dalam proses pemungutan maupun pemanfaatan hasil pajak untuk kepentingan publik.

Tiga indikator utama yang menjadi fokus dalam menganalisis keadilan dalam penerapan pajak kendaraan bermotor adalah: beban pajak, sistem pajak, dan ketimpangan pendapatan. Indikator beban pajak merujuk pada sejauh mana tarif atau nilai pajak yang dikenakan sudah sesuai dan tidak memberatkan masyarakat. Sementara itu, sistem pajak menelaah apakah mekanisme pemungutan berjalan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan ketimpangan pelayanan. Adapun indikator ketimpangan pendapatan melihat bagaimana distribusi hasil pajak berdampak terhadap kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan kondisi ekonomi, serta apakah penerimaan pajak justru memperlebar atau menyempitkan kesenjangan tersebut. Melalui dimensi ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana sistem perpajakan kendaraan bermotor yang diterapkan di Kabupaten Jayawijaya telah menjamin prinsip keadilan fiskal, baik dari sisi penarikan maupun pemanfaatannya. Penilaian atas dimensi ini akan diperkuat melalui hasil wawancara dari informan terkait dan perspektif masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan perpajakan di daerah tersebut.

a. Beban Pajak

Beban pajak merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat keadilan dalam kebijakan perpajakan, terutama dalam hal apakah kewajiban pajak yang dibebankan kepada masyarakat sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing lapisan. Beban yang terlalu berat bisa menimbulkan resistensi dan penurunan kepatuhan wajib pajak, sementara beban yang terlalu ringan bisa mengurangi potensi penerimaan daerah. Untuk mengetahui

persepsi atas beban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya, peneliti melakukan wawancara kepada dua informan yang mewakili perspektif kebijakan dan masyarakat.

Kepala Bidang Bapenda Kabupaten Jayawijaya menyatakan:

Secara umum, tarif pajak kendaraan bermotor yang berlaku sudah mengikuti ketentuan provinsi dan nasional, dan bersifat proporsional. Namun memang untuk masyarakat di pedalaman, yang penghasilannya rendah, kadang merasa terbebani meski hanya memiliki kendaraan kecil.

Sementara itu, informan dari masyarakat mengungkapkan:

Bagi kami yang tinggal jauh dan penghasilannya tidak menentu, pajak kendaraan kadang terasa berat. Tapi kalau orang yang penghasilannya lebih tinggi, mungkin tidak terlalu jadi masalah. Jadi ya tergantung kondisi masing-masing.

Dari keterangan kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya masih dirasakan beragam antar lapisan masyarakat. Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, beban pajak kadang terasa berat, sementara bagi kelompok menengah ke atas cenderung dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa aspek keadilan dalam penetapan tarif pajak masih perlu disesuaikan dengan karakteristik ekonomi lokal.

b. Sistem Pajak

Sistem pajak yang baik tidak hanya menekankan efisiensi dan akurasi dalam pemungutan, tetapi juga mencerminkan keadilan dalam pelaksanaannya. Prinsip keadilan ini mencakup kesetaraan dalam perlakuan terhadap wajib pajak, transparansi dalam prosedur, serta akses yang setara terhadap layanan pembayaran pajak. Untuk mengetahui sejauh mana sistem perpajakan kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya telah mencerminkan prinsip keadilan, dilakukan wawancara dengan dua informan teknis.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Jayawijaya menjelaskan:

Kami berupaya agar pelayanan pajak dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Tapi karena kendala geografis dan sarana yang terbatas, memang tidak semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama cepat atau mudah.

Kepala Dinas Bapenda menambahkan:

Masih ada tantangan dalam hal distribusi layanan, terutama di wilayah distrik terpencil. Tapi kami terus lakukan jemput bola, misalnya dengan pelayanan keliling atau kerja sama dengan aparat kampung untuk menyampaikan informasi pajak.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan kendaraan bermotor di Jayawijaya masih menghadapi tantangan dalam menjangkau keadilan secara menyeluruh, terutama akibat hambatan geografis. Namun, langkah-langkah progresif telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkecil kesenjangan pelayanan, salah satunya melalui program layanan jemput bola dan pendekatan partisipatif.

c. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan menjadi isu yang cukup krusial dalam perumusan kebijakan fiskal. Sistem perpajakan idealnya dirancang tidak hanya untuk menghimpun pendapatan, tetapi juga mampu berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, peneliti mencoba mengkaji apakah sistem perpajakan kendaraan bermotor berperan dalam mengatasi ketimpangan tersebut.

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah mengemukakan:

“Peran pajak kendaraan bermotor secara langsung dalam mengurangi ketimpangan memang terbatas. Tapi melalui penerimaan yang terkumpul, dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang merata, misalnya subsidi BBM atau pembangunan jalan di wilayah terpencil.”

Kepala Dinas Bapenda menambahkan:

Kami juga terus mendorong agar hasil pajak bisa diarahkan untuk program-program pembangunan yang menyentuh masyarakat bawah, termasuk peningkatan fasilitas umum dan bantuan kendaraan operasional untuk distrik-distrik.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan kendaraan bermotor di Jayawijaya belum secara langsung mengatasi ketimpangan pendapatan, namun melalui pemanfaatan hasil penerimaannya, pemerintah berupaya menyalurkan kembali manfaat tersebut kepada masyarakat luas, terutama kelompok rentan. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi tidak langsung sistem perpajakan dalam memperkecil jurang ketimpangan ekonomi di daerah.

3.3. Daya Guna Ekonomi

Daya guna ekonomi merujuk pada sejauh mana kebijakan dan pelaksanaan pajak kendaraan bermotor memberikan dampak yang nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan efisiensi pengambilan keputusan ekonomi, baik dari sisi pemerintah daerah maupun pelaku ekonomi lokal. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya yang memiliki karakteristik wilayah pegunungan dengan keterbatasan infrastruktur dan pasar yang belum sepenuhnya berkembang, maka penerapan sistem perpajakan harus mampu mendukung kelancaran perputaran ekonomi tanpa membebani masyarakat atau pelaku usaha secara berlebihan.

Tiga indikator digunakan untuk mengukur daya guna ekonomi dalam pelaksanaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya, yaitu: aktivitas ekonomi dan pasar, keputusan ekonomi, serta prosedur administrasi pajak. Indikator aktivitas ekonomi dan pasar menilai bagaimana dampak kebijakan perpajakan terhadap geliat perdagangan, jasa, dan pergerakan kendaraan di daerah. Keputusan ekonomi mencakup pengaruh pajak terhadap perilaku konsumen dan pelaku usaha dalam membeli, menggunakan, atau menjual kendaraan. Sedangkan prosedur administrasi pajak menilai efisiensi proses administrasi dan kepastian hukum yang dirasakan oleh wajib pajak, apakah proses tersebut memperlancar atau justru memperlambat dinamika ekonomi masyarakat.

Melalui dimensi ini, diharapkan dapat diketahui apakah sistem perpajakan yang diterapkan di daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga mendukung terciptanya iklim ekonomi yang kondusif dan berdaya guna tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

a. Aktivitas Ekonomi Dan Pasar

Sistem perpajakan idealnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, terutama dengan memberikan ruang yang sehat bagi aktivitas perdagangan, transportasi, dan jasa. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, sektor transportasi memiliki peran penting sebagai penggerak distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah sistem pajak kendaraan bermotor yang diterapkan mendukung atau justru menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor- sektor tersebut.

Kepala Bidang Bapenda Kabupaten Jayawijaya menyampaikan:

Pajak kendaraan bermotor tidak bisa dilepaskan dari aktivitas ekonomi karena kendaraan merupakan sarana utama pergerakan orang dan barang. Selama ini, kami melihat tidak ada hambatan berarti. Justru ada peningkatan kendaraan usaha seperti mobil barang yang membuktikan bahwa sistem ini mendukung pertumbuhan sektor logistik dan perdagangan lokal.

Masyarakat juga memberikan pandangan:

Selama kendaraan digunakan untuk usaha, bayar pajak itu jadi bagian dari perhitungan usaha saja asalkan prosedurnya jelas dan tarifnya tidak berubah-ubah, kami anggap itu wajar dan tidak menghambat usaha kami.

Dari keterangan kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya relatif tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan, dalam beberapa sektor seperti logistik dan distribusi barang, sistem tersebut dinilai telah menjadi bagian yang terintegrasi dengan pola kerja pelaku usaha di daerah.

b. Keputusan Ekonomi

Salah satu peran penting dari kebijakan pajak adalah memengaruhi keputusan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Tarif, kemudahan, dan manfaat dari sistem perpajakan bisa

mendorong keputusan produktif, namun jika tidak proporsional bisa menimbulkan efek negatif terhadap pembelian, kepemilikan, maupun pemanfaatan kendaraan bermotor.

Sekretaris Bapenda menjelaskan:

Kami melihat bahwa masyarakat tidak ragu membeli kendaraan, bahkan pertumbuhannya cukup signifikan di beberapa tahun terakhir. Ini artinya tarif dan sistem yang kami terapkan tidak menjadi penghalang keputusan ekonomi. Bahkan, pajak kendaraan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab ekonomi, bukan beban yang menunda pembelian.

Kepala Dinas Bapenda menambahkan:

Pajak justru bisa mendorong keputusan produktif kalau dikelola dengan baik. Misalnya, masyarakat tahu kalau bayar pajak tepat waktu, maka pelayanan kendaraan atau distribusi barang mereka juga tidak terganggu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pajak kendaraan bermotor di Jayawijaya tidak menghalangi keputusan ekonomi produktif. Justru dengan adanya kepastian dan kemudahan dalam pemungutan, sistem ini mendorong perilaku ekonomi yang sehat di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

c. **Prosedur Administrasi Pajak**

Prosedur administrasi dalam perpajakan sangat menentukan efektivitas penerimaan serta kenyamanan bagi wajib pajak. Prosedur yang terlalu rumit dan tidak efisien bisa menimbulkan penurunan kepatuhan dan memperlambat proses pelaporan serta pembayaran. Untuk mengetahui hambatan yang sering ditemui, peneliti melakukan wawancara dengan pihak teknis dan masyarakat.

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah menjelaskan:

Beberapa hambatan yang masih sering ditemui adalah akses pelayanan yang terbatas bagi masyarakat di distrik- distrik jauh. Mereka harus ke Wamena hanya untuk urus pajak. Selain itu, integrasi data antarinstansi juga masih perlu ditingkatkan.

Masyarakat menambahkan:

Kadang kami tidak tahu jadwal atau lokasi pasti pembayaran pajak. Harus tanya ke orang dulu. Kalau bisa semua itu diumumkan jelas, bahkan kalau bisa lewat HP atau radio kampung.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur administrasi perpajakan di Jayawijaya masih menghadapi hambatan terutama dalam hal akses, informasi, dan integrasi data bahwa sistem pajak kendaraan bermotor di Jayawijaya tidak menghalangi keputusan ekonomi produktif. Justru dengan adanya kepastian dan kemudahan dalam pemungutan, sistem ini mendorong perilaku ekonomi yang sehat di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

3.4. Kemampuan Melaksanakan Pajak

Kemampuan dalam melaksanakan pajak merupakan dimensi penting yang menggambarkan kesiapan institusi pemerintah daerah dalam mengelola seluruh proses pemungutan pajak, mulai dari administrasi, kualitas sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat ditentukan oleh seberapa baik kapasitas kelembagaan dan perangkat pendukung di tingkat daerah berfungsi. Di wilayah seperti Kabupaten Jayawijaya yang memiliki tantangan geografis, terbatasnya akses, dan beragam kondisi sosial-ekonomi masyarakat, maka kapasitas pelaksana pajak menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Tiga indikator yang menjadi fokus dalam dimensi ini adalah: kemampuan administrasi pajak, kualitas dan profesionalisme aparatur, serta penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pajak. Kemampuan administrasi mencerminkan sejauh mana sistem pencatatan, pelaporan, serta prosedur layanan perpajakan mampu berjalan secara tertib dan efektif. Kualitas dan profesionalisme menyangkut kompetensi, integritas, serta etos kerja aparatur pajak dalam memberikan layanan publik. Sementara itu, penggunaan teknologi menggambarkan modernisasi sistem yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan kemudahan akses bagi wajib pajak, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan.

Melalui tiga indikator ini, akan dianalisis bagaimana kesiapan struktural dan fungsional pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayawijaya, dalam melaksanakan kebijakan pajak kendaraan bermotor secara optimal.

a. **Kemampuan Administrasi Pajak**

Kemampuan administrasi perpajakan menjadi aspek fundamental dalam memastikan seluruh proses pemungutan berjalan sesuai prosedur dan mencerminkan akuntabilitas publik. Dalam konteks penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya, kemampuan administratif ini mencakup pencatatan data wajib pajak, pelaporan, penagihan, hingga pengawasan. Efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan administrasi di tingkat pusat dan daerah turut menentukan keberhasilan pengelolaan pendapatan secara keseluruhan.

Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Jayawijaya menyampaikan:

Secara umum, kemampuan administrasi kita di daerah masih terus berkembang. Kami sudah menggunakan sistem yang terintegrasi dengan provinsi, tapi masih ada keterbatasan terutama dalam hal kapasitas SDM untuk mengelola data secara real-time. Kadang laporan lambat karena infrastruktur belum memadai.

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah menambahkan:

Masih ada kendala koordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten terutama dalam proses sinkronisasi data kendaraan. Di sisi lain, kami masih mengandalkan tenaga administrasi yang terbatas, sehingga pekerjaan menumpuk saat masa pelaporan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan administrasi perpajakan di Kabupaten Jayawijaya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan keterbatasan sumber daya administratif di daerah. Namun demikian, adanya sistem terintegrasi dan semangat perbaikan menunjukkan arah yang positif untuk penguatan administratif di masa mendatang.

b. **Kualitas dan Profesionalisme**

Sumber daya manusia yang profesional dan kompeten menjadi kunci sukses pelaksanaan kebijakan perpajakan. Di daerah seperti Kabupaten Jayawijaya, tantangan geografis dan keterbatasan akses menuntut aparat yang tidak hanya memahami teknis perpajakan, tetapi juga memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam melayani masyarakat. Untuk itu, peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat menjadi kebutuhan yang mendesak.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Jayawijaya mengungkapkan:

Peningkatan kompetensi harus terus dilakukan. Kami butuh pelatihan rutin yang menyesuaikan perkembangan regulasi dan teknologi perpajakan. Selain itu, pembinaan etika pelayanan publik juga penting agar aparat tidak hanya pintar secara teknis, tapi juga melayani dengan sikap yang baik.

Kepala Bidang Bapenda menambahkan:

Kami menyadari ada gap pengetahuan antara petugas yang baru dan yang sudah lama. Pelatihan berjenjang, serta insentif bagi pegawai yang berprestasi perlu dikembangkan agar profesionalisme terus tumbuh.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pajak kendaraan bermotor, perlu adanya pelatihan berkelanjutan, pengembangan karier berbasis kinerja, dan pembinaan etika profesi. Hal ini akan menciptakan aparat yang tidak hanya ahli secara teknis, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat dalam sistem perpajakan.

c. **Penggunaan Teknologi**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Di Kabupaten Jayawijaya, penerapan teknologi dalam administrasi pajak masih menghadapi tantangan, terutama dari segi infrastruktur dan literasi digital masyarakat maupun aparat.

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah menjelaskan:

Kami sudah mulai menerapkan sistem digital seperti pembayaran non-tunai dan pencatatan online. Tapi tantangannya adalah jaringan internet yang tidak merata dan perangkat yang belum sepenuhnya tersedia di distrik- distrik.

Masyarakat menambahkan:

Bayar pajak lewat HP itu bagus, tapi di kampung kami susah sinyal. Kami lebih sering ke kantor pajak langsung. Kalau nanti sistemnya diperluas ke kampung-kampung, kami pasti mau pakai.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan di Jayawijaya masih menghadapi kendala serius, terutama akses internet dan fasilitas penunjang. Namun, kesadaran akan pentingnya teknologi sudah mulai tumbuh, baik dari sisi pemerintah daerah maupun masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada penguatan infrastruktur digital dan perluasan literasi teknologi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja perpajakan secara digital.

3.5. Kecocokan sebagai Sumber Pendapatan

Pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis pajak daerah memiliki potensi strategis dalam memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, untuk dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan pembangunan, perlu dikaji sejauh mana jenis pajak ini cocok dan relevan dengan kondisi wilayah, karakteristik ekonomi, dan kemampuan fiskal daerah. Di Kabupaten Jayawijaya yang memiliki topografi pegunungan dan keterbatasan konektivitas, pertanyaan mengenai efektivitas pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan utama menjadi hal yang penting untuk dikaji secara mendalam. Dimensi kecocokan sebagai sumber pendapatan dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu: potensi pajak, kemampuan pajak, dan kesesuaian pajak. Potensi pajak mengacu pada seberapa besar jumlah objek pajak dan wajib pajak kendaraan bermotor yang tersedia di wilayah tersebut serta kecenderungan pertumbuhannya. Kemampuan pajak mencerminkan daya pungut yang dimiliki pemerintah daerah terhadap jenis pajak ini, termasuk dari sisi regulasi, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya. Sementara itu, kesesuaian pajak melihat sejauh mana jenis pajak kendaraan bermotor selaras dengan struktur ekonomi lokal dan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga tidak hanya menjadi beban masyarakat, tetapi juga instrumen yang tepat guna.

Melalui dimensi ini, akan diketahui apakah pajak kendaraan bermotor memang merupakan jenis pajak yang paling tepat untuk diandalkan sebagai pilar penerimaan daerah di Kabupaten Jayawijaya, ataukah perlu adanya diversifikasi sumber pendapatan lainnya yang lebih kontekstual dengan kondisi wilayah.

a. Potensi Pajak

Potensi pajak mengukur sejauh mana pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya mampu digali secara optimal sebagai sumber pendapatan. Potensi ini mencakup jumlah objek pajak, pertumbuhan kendaraan bermotor, serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak secara berkala. Pengelolaan potensi pajak yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.

Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Jayawijaya menjelaskan:

Potensi pajak kendaraan bermotor di Jayawijaya masih sangat besar. Pertumbuhan jumlah kendaraan setiap tahun cukup signifikan, apalagi kendaraan roda dua dan roda empat untuk transportasi antar distrik. Hanya saja belum semua pemilik kendaraan taat membayar pajak, jadi potensi itu belum tergali sepenuhnya.

Kepala Bidang Bapenda menambahkan:

Kami masih menemui banyak kendaraan yang belum terdata dengan baik, terutama yang digunakan di daerah pinggiran. Kalau pendataan dan pengawasan diperkuat, potensi penerimaan bisa meningkat jauh.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki potensi besar sebagai sumber PAD, namun belum tergali secara optimal. Tantangan terbesar

adalah dalam aspek pendataan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

b. Kemampuan Pajak

Kemampuan pajak mengacu pada sejauh mana daya pungut pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kapasitas ekonomi masyarakat di daerah. Pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan kepatuhan dan menambah beban masyarakat, sedangkan pajak yang terlalu rendah akan mengurangi potensi penerimaan oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan pajak disesuaikan dengan realitas ekonomi lokal.

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah menyatakan:

Kami memahami bahwa kondisi ekonomi masyarakat Jayawijaya sangat beragam. Ada yang mampu, ada juga yang masih hidup pas-pasan. Karena itu, kami berupaya agar sistem pembayaran pajak bisa dilakukan secara bertahap atau dengan pendekatan persuasif, bukan hanya mengandalkan sanksi.

Sekretaris Bapenda menambahkan:

Tarif pajaknya sebenarnya sudah sesuai aturan provinsi, tapi daya beli masyarakat perlu terus dipertimbangkan dalam implementasinya. Kami juga terbuka untuk pendekatan kemudahan seperti diskon denda dan pembayaran berbasis mobile untuk meringankan beban masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan pajak yang diterapkan di Jayawijaya cukup sejalan dengan kapasitas ekonomi masyarakat, meskipun diperlukan inovasi dalam metode pembayaran dan pendekatan sosial agar kebijakan ini lebih inklusif dan tidak menimbulkan tekanan ekonomi bagi wajib pajak.

c. Kesesuaian Pajak

Kesesuaian pajak berkaitan dengan kecocokan jenis pajak kendaraan bermotor terhadap struktur ekonomi lokal dan kebutuhan pembangunan daerah. Di daerah seperti Jayawijaya, di mana kendaraan menjadi sarana utama transportasi antardistrik dan dukungan logistik, maka penerapan pajak kendaraan bermotor perlu dipastikan tidak justru menghambat mobilitas ekonomi.

Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Jayawijaya menyatakan:

Pajak kendaraan bermotor cukup cocok diterapkan di Jayawijaya karena kendaraan adalah aset penting bagi ekonomi masyarakat. Tapi penerapannya tetap harus mempertimbangkan fungsinya sebagai alat usaha, bukan hanya objek pajak.

Masyarakat menambahkan:

Kami pakai motor dan mobil bukan buat gaya, tapi buat antar barang, antar orang, bahkan untuk urusan kebun dan pasar. Jadi kalau pajaknya sesuai dan tidak menyulitkan, kami akan ikut bayar.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis pajak kendaraan bermotor sesuai dengan karakteristik ekonomi Jayawijaya, di mana kendaraan merupakan alat penting dalam aktivitas ekonomi harian masyarakat. Oleh karena itu, pajak ini relevan dijadikan sumber pendanaan publik asalkan penerapannya memperhatikan fungsi sosial dan ekonomi kendaraan di daerah.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jayawijaya, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam optimalisasi penerimaan, terutama dari sisi kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penagihan. Sama halnya dengan temuan penelitian (Anawati & Kurnianingsih, 2024) yang menemukan bahwa pajak kendaraan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta. Penelitian ini memperkuat temuan Aisyah karena dalam konteks Jayawijaya, meskipun letak geografis menjadi hambatan, kontribusi PKB tetap nyata dalam struktur pendapatan daerah.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Restina & Sari, 2023) yang menyatakan bahwa kebijakan pajak kendaraan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung

pembangunan. Di Kabupaten Jayawijaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa dana dari PKB memang diarahkan untuk mendukung sektor pembangunan, terutama infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan antar distrik. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian (Fransiska, 2023) yang menyimpulkan bahwa pajak kendaraan memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kota Semarang. Hal ini terbukti pula di Jayawijaya, meskipun dengan skala dan kapasitas fiskal yang lebih kecil, di mana hasil penerimaan PKB digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Berbeda dengan temuan (Candra, 2024) yang menekankan pada implikasi kebijakan pajak kendaraan daerah yang bersifat optimal di Kota Denpasar, penelitian ini menemukan bahwa di Jayawijaya kebijakan yang ada masih memerlukan perbaikan terutama dari sisi sosialisasi dan pengawasan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan belum sepenuhnya tercapai seperti halnya di daerah yang lebih maju secara administratif dan fiskal. Temuan ini juga memperkuat penelitian (Irsan, 2022) yang menyebutkan bahwa efektivitas PKB memberikan dampak positif terhadap PAD. Di Jayawijaya, efektivitas pemungutan PKB—meskipun masih perlu ditingkatkan—telah memberikan kontribusi nyata terhadap realisasi PAD, terutama setelah dilakukan optimalisasi sistem pelayanan pajak dan kerja sama dengan Samsat.

Dengan demikian, secara umum, temuan penelitian ini mendukung dan memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa PKB merupakan komponen penting dalam PAD, namun juga menambahkan dimensi baru bahwa tantangan geografis dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor pembeda yang memengaruhi efektivitas kebijakan di daerah terpencil seperti Jayawijaya.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya, tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat yang mengganggu efektivitas dan optimalisasi penerimaan daerah. Faktor-faktor ini bisa berasal dari internal lembaga pengelola pajak seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem yang belum sepenuhnya digital, dan sarana prasarana pendukung yang terbatas. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi geografis yang berat, rendahnya literasi pajak masyarakat, serta ketidakmerataan informasi.

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayawijaya telah melakukan sejumlah upaya strategis guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upayan ini meliputi pendekatan teknis, kebijakan, dan sosial, seperti memperkuat koordinasi lintas OPD, menjalankan pelayanan jemput bola ke distrik- distrik mengembangkan kapasitas SDM, dan memanfaatkan teknologi secara bertahap. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap bisa dilaksanakan secara optimal dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayawijaya. Meskipun kontribusinya menunjukkan peningkatan, realisasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, hambatan administratif, serta kondisi geografis yang menantang. Upaya menuju sistem perpajakan yang efisien dan transparan sudah dilakukan, namun masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek teknologi dan koordinasi antarinstansi. Dari segi keadilan, sistem PKB masih menghadapi tantangan, terutama terkait perbedaan akses layanan, kemampuan ekonomi masyarakat, dan hambatan administratif, yang memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan pajak. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan layanan melalui pendekatan berbasis kebutuhan lokal, tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. PKB juga dinilai tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dalam sektor transportasi dan distribusi barang. Selain itu, karakteristik ekonomi Jayawijaya yang bergantung pada kendaraan bermotor menjadikan PKB relevan sebagai sumber utama PAD. Namun, tantangan seperti sulitnya akses ke daerah pedalaman, minimnya infrastruktur dan literasi pajak, serta terbatasnya aparatur, masih perlu diatasi. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui inovasi seperti layanan pajak keliling, pelatihan pegawai, serta pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Untuk itu, peningkatan efektivitas penerimaan PKB secara berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, perbaikan sistem administrasi, serta pelayanan yang lebih mudah dan adil bagi seluruh masyarakat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada wilayah tertentu dan belum mencakup seluruh daerah pedalaman Jayawijaya. Keterbatasan waktu, responden, dan teknis pengumpulan data juga memengaruhi kedalaman analisis. Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya perlu menjangkau wilayah pedalaman, menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, serta memanfaatkan teknologi digital. Fokus juga dapat diarahkan pada dampak jangka panjang PKB terhadap ekonomi dan kesejahteraan daerah

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayawijaya, para narasumber, dan seluruh responden dan pihak-pihak lain yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anawati, F., & Kurnianingsih, R. (2024). PENGARUH PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 28(11). <https://Oaj.Jurnalhst.Com/Index.Php/Jekma/Article/View/5532>
- CANDRA, N. S. (2024). *IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT DENPASAR*. Universitas Mahasaraswati Denpasar. <https://Eprints.Unmas.Ac.Id/Id/Eprint/7318>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Dlbbdqaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=PP1>
- Dougherty, S. M., & Kim, C. (2019). *Fiscal Decentralisation And Inclusive Growth In Asia . Organisation For Economic Co-Operation And Development*. <https://Www.Oecd.Org/En/Publications/Fiscal>
- Fransiska, N. R. (2023). ANALISIS PENGARUH PAJAK TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN BINTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Miftahul Ulum*, 1(2), 51–55. <https://Journal.Iaimutanjungpinang.Ac.Id/Junamu/Index>
- Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 267–272. <https://Doi.Org/10.59086/Jam.V1i2.136>
- Jeppesen, M. (2021). What We Hoped For And What We Achieved: Tax Performance Of Semi-Autonomous Revenue Authorities In Sub-Saharan Africa. *Public Administration And Development*, 41. <https://Doi.Org/10.1002/Pad.1952>
- Kurniawan, C., Pribadi, U., & Iqbal, M. (2023). THE ROLE OF E-GOVERNANCE IN IMPROVING LOCAL GOVERNMENTS PERFORMANCE (CASE STUDY: SUMBAWA REGENCY). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(3), 1139–1154. <https://Doi.Org/10.26811/Peuradeun.V11i3.795>
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=7blseaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=PA15>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia. <https://Doi.Org/10.11594/Ubpress9786232967496>
- Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). *Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik*. CV Remaja Rosdakarya. <http://Eprints2.Ipdn.Ac.Id/Id/Eprint/846/1/Inovasi%20Pelayanan%20Organisas%20Publik%20COPY.Pdf>
- Purnamasari, D., Sari, D., & Mulyatii, Y. (2024). The Influence Of Tax Sanctions On Improving Compliance Among Motor Vehicle Taxpayers: A Case Study Of The Samsat Office In Bandung City, Indonesia. *Journal Of Ecohumanism*, 3(7), 2339–2354. <https://Doi.Org/10.62754/Joe.V3i7.4642>
- Puspasari, H. M., Mustaqim, I. Z., Utami, A. T., Syalevi, R., & Ruldeviyani, Y. (2024). Evaluation Of Indonesia's Police Public Service Platforms Through Sentiment And Thematic Analysis. *IAES International Journal Of Artificial Intelligence*, 13(2), 1596–

1607. <https://doi.org/10.11591/ijai.V13.I2.Pp1596-1607>

Restina, R., & Sari, P. Z. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak Dan Layanan E-Samsat Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Surabaya Timur. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 2(1), 20–31. <https://doi.org/10.29138/Jkis.V2i1.18>

Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.4236/ojepi.2023.131002>

